

**ANALISIS PERTUMBUHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) DENGAN MENGGUNAKAN ASPEK
NON KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



NAMA : VERA OCTAVIA

NIM : 222012332

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**ANALISIS PERTUMBUHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) DENGAN MENGGUNAKAN ASPEK
NON KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



NAMA : VERA OCTAVIA

NIM : 222012332

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vera octavia
NIM : 22 2012 332
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 2017

Yang membuat pernyataan,



Vera octavia
NIM: 222012332

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dengan Menggunakan Aspek Non Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang
Nama : Vera octavia
NIM : 22 2012 332
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 08 Februari 2017
Pembimbing,



(Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Mengetahui,
Dekan

u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *"Segungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap" (QS. Al-Insyirah, 6-8).*

(Vera octavia)

Ku persembahkan kepada :

- *Ayahanda dan ibunda tercinta*
- *Saudara-saudara tersayang*
- *Dosen pembimbingku Bpk "Betri" yang dengan sangat sabar membimbing dan memotivasiku*
- *Yang selalu ada "Shandy"*
- *Almamatunku*



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Menggunakan Aspek Non Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”**.

Penulisan laporan penelitian ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu peneliti sampaikan terima kasih terutama pada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada peneliti. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Betri sirajuddin, S.E, M.Si, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas serta memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Peneliti juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.

2. Bapak Drs Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan S.E., Ak., M.Si., CA selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi FEB UMP.
4. Ibu Nina Sabrina S.E, M.Si selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmunya baik praktik maupun teori selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh Staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah membantu penelitian ini.
7. Teman seperjuanganku angkatan 2012 dan beserta semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materil dan spiritual yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2017

Peneliti

Vera octavia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAN DAFTAR TABEL.....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Sebelumnya	7
B. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Kinerja.....	10
a. Definisi Kinerja	10
b. Pengukuran Kinerja	11
c. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	12
d. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja.....	12
2. Prinsip-prinsip Pemilihan Ukuran Kinerja.....	14
3. Siklus Pengukuran Kinerja.....	15
4. Teknologi Pengukuran Kinerja.....	16
a. Perspektif Pelanggan.....	17
b. Perspektif Konsumen.....	17
c. Perspektif Proses Bisnis Internal.....	18
d. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.....	18
5. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	22
a. Filosofi BPHTB.....	22
b. Pengertian BPHTB.	23
c. Dasar Hukum BPHTB.....	23
d. Subjek Pajak BPHTB.....	24
e. Objek Pajak BPHTB.....	24
f. Objek Pajak Yang tidak dikenakan Untuk BPHTB.....	24
6. Tujuan BPHTB.....	25

7. Pendapatan Asli Daerah.....	25
8. Pengertian Laju Pertumbuhan.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Penelitian	28
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Data yang Digunakan.....	29
E. Metode Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Sejarah Singkat Dispenda Kota Palembang	32
2. Visi dan Misi Dispenda kota Palembang.....	34
3. Struktur Organisasi.....	34
a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda.....	34
b. Susunan Organisasi.....	36
c. Tugas dan Fungsi.....	39
4. Data BPHTB tahun 2012-2015.....	48
5. Pengolahan Data	49
a. Perspektif Pelanggan.....	49
b. Perspektif Proses Bisnis Internal.....	52

c. Perspektip Pembelajaran Dan Pertumbuhan.....	54
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
1. Perspektif Pelanggan.....	55
2. Perpektif Proses Bisnis Internal.....	56
3. Perspektif Pembelajaran.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Perkembangan Penerimaan BPHTB Kota Palembang tahun 2012-2015..... 4
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya..... 10
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel..... 28
Tabel IV. 1	Data BPHTB.....48
Tabel IV.2	Jumlah SSPD Wajib Pajak BPHTB.....49
Tabel IV.3	Rekapitulasi Perhitungan.....52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dispenda kota Palembang.....	38

ABSTRAK

Vera Octavia / 222012332/ 2017/ Analisis Pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan Aspek Non Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang/ Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apakah pengukuran pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan aspek non keuangan sudah cukup baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan aspek non keuangan apakah sudah cukup baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No 21 Palembang. Variable penelitian adalah Pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan pengukuran kinerja Non keuangan. Metode pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan kualitatif dengan teknik analisis menggunakan rumus laju pertumbuhan.

Sejak di berlakukannya Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Laju pertumbuhan penerimaan BPHTB mengalami peningkatan, apabila dihubungkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan BPHTB memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan pengukuran pertumbuhan BPHTB dengan menggunakan aspek non keuangan terdiri dari : Perspektif pelanggan, Perspektif proses bisnis internal, dan Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Kata kunci : Laju pertumbuhan, aspek non keuangan, BPHTB dan PAD

ABSTRACT

Vera Octavia /222012332/2017/The Analysis of The Duty on Land and Building Right Acquisition Growth by Using Non-Financial Aspects in Improving Region Own Source Revenue (PAD) of Palembang/Public Sector Accounting.

The problem of this study was whether or not the duty on land and building right acquisition growth by using non-financial aspects in improving region own source revenue (PAD) of Palembang growth was effective. The objective of this study was to find out the effectiveness of duty on land and building right acquisition growth by using non-financial aspects in improving region own source revenue (PAD) of Palembang.

This study was descriptive research that was conducted at the district revenue department of Palembang that was located at JalanMerdeka No 21 Palembang. The variable of this study was the duty on land and building right acquisition growth by using non-financial performance measurement. The methods for collecting the data in this study were interview and documentation. The analysis data used in this study was qualitative by using growth rate formula.

Since the 2009 legislation No.28 about duty on land and building right acquisition had been implemented, the duty on land and building right acquisition growth increased. When it was correlated with the region own source revenue (PAD) of Palembang, it could be concluded that the acceptance of the duty on land and building right acquisition contributed on the acceptance of region own source revenue (PAD) of Palembang. Meanwhile, the measurement of the duty on land and building right acquisition growth by using non-financial aspects were: customer perspective, internal business process perspective, and learning and growth perspective.

Keywords: *Growth rate, non-financial aspects, The Duty on Land and Building Right Acquisition (BPHTB,) and Region Own Source Revenue PAD*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari PAD. pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih besar daripada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan PAD, upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat di pungut pajak dan retribusinya.

Salah satu peranan pemerintah dalam system perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti berurusan dengan pajak oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang bersangkutan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pembayaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua Negara. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak

sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan Negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas system (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada system yang lebih baik.

Kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaanya. Daerah selalu merasa sumber dana yang dimiliki kurang memadai dan pemerintah pusat dituduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah. Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemda yang semakin tergantung pada dana atau bantuan kiriman pemerintah pusat atau provinsi (Suhadak dan Nugroho,2007:153)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan salah satu jenis pajak pusat yang di alihkan menjadi pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah yang mulai efektif berlaku sejak 1 januari 2011. Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia (Soewardi,2014). Selaras dengan adanya salah satu tujuan fiskal, yaitu *local taxing power*, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk menggali sumber dana dari pajak daerah, salah satunya adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan merupakan suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, maka per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi yang dilakukan akan langsung ditangani oleh Pemerintah atau Kota setempat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dialihkan menjadi pajak daerah dipercaya mempunyai potensi yang sangat besar bagi pendapatan daerah. Pada umumnya, suatu pemungutan pajak pasti ada peraturannya yang menjadi dasar pengenaannya. Dasar pengenaan inilah yang menjadi acuan atau pedoman dalam penetapan pengenaan BPHTB untuk selanjutnya dapat digunakan dalam menghitung BPHTB terutang.

Pelaksanaan pemungutan BPHTB diindikasikan bahwa masih ada wajib pajak yang belum mengetahui pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan. Masyarakat cenderung mengetahui adanya pengenaan BPHTB atas perolehan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan dari pihak notaries/PPAT. Padahal dalam pemungutan BPHTB ini menganut *self assessment system*, dimana suatu system pemungutan pajak yang memberikan

kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terhutang. Jika wajib pajak tidak mengetahui dasar dan ketentuan dasar pengenaan BPHTB, wajib pajak tidak dapat menghitung sendiri pajak BPHTB terutang. Dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPHTB ini menjadi salah satu penghambat dalam pemungutan BPHTB.

Tujuan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan adalah tetap berhasil dan tumbuh guna memperbanyak Pendapatan Asli Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang harus menggunakan system pengukuran dan manajemen yang di turunkan melalui visi , misi, dan strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai. Maka dari itu dinas pendapatan daerah kota Palembang tak hanya berfokus pada sistem pengukuran yang menggunakan aspek keuangan saja tetapi juga menggunakan aspek non keuangan, yang meliputi 3 perspektif yaitu: Perspektif pelanggan, Perspektif proses bisnis internal, Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Berikut ini perkembangan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kota Palembang tahun 2012-2015.

Tabel I.1
Perkembangan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kota Palembang tahun 2012-2015

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Jumlah SSPD	Persen (%)
2012	68.000.000.000,00	99.143.722.955,00	7416	145,80
2013	80.549.840.000,00	80.867.194.759,00	5917	100,39
2014	68.000.000.000,00	132.727.606.144,00	8260	154,33
2015	116.269.000.000,00	92.038.580.407,00	8804	79,16

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Palembang, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2015 penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan dan tidak mencapai target sedangkan jika dilihat dari Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) yang dilaporkan wajib pajak pada sektor BPHTB mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan pengukuran menggunakan aspek non keuangan yang digunakan untuk mendukung maupun mengetahui sebab terjadinya penurunan yang di lihat dari aspek keuangan dan berdasarkan latar belakang serta melihat fenomena pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pertumbuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Menggunakan Aspek Non Keuangan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”**.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan penulis, maka penulis tertarik meneliti dengan perumusan masalah mengenai: Apakah pengukuran pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menggunakan aspek non keuangan sudah cukup baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diatas , maka tujuan yang akan dicapai adalah: untuk mengetahui pertumbuhan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan menggunakan aspek non

keuangan apakah sudah cukup baik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Dapat memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperluas wawasan dan menambah pengalaman, serta memperluas pengetahuan bagi penulis terutama dalam mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dapat memberikan masukan dan bahan pemikiran yang bermanfaat mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat diambil guna meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kota Palembang.

c. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menjadi sumber informasi,serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, (2001). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE, Universitas Gaja Mada.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kaplan, Robert S dan David P.Norton.2009, *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*, Jakarta: Erlangga.
- Lia Sapitri. (2014). Evaluasi Strategi Pendekatan *Balance Scorecard* untuk Meningkatkan Pertumbuhan RSUD Haji Surabaya. (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi),(online), Vol. 3, No.2, (<http://ejournal.stiesia.ac.id/jira/download/SuppFile/320/186> , diakses 3 November 2016).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ni Made Diyah Agung Padma Dewi. (2014). Penilaian Kinerja Berdasarkan Keuangan dan non Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya.(E-journal Akuntansi Universitas Udayana), (online),ISSN.2302-8556, (<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/viewFile/7625/6908>, diakses 3 November 2016)
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus .Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suhadak dan Trilakso Nugroho. (2007). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Penerbit Bayumedia.
- Silitonga, Rina. (2012). Intensifikasi Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011, Jurnal Universitas Negeri Semarang, Indonesia,ISSN2252-6536, <http://jurnal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/download/183/282>, diakses pada 20 juni 2016.
- Soewardi,Tiara, (2014). Dinamika Pengelolaan BPHTB Setelah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah.Jurnal Universitas Brawijaya Malang (<http://jimfeb.ub.ac.id/indek.php/jimfeb/article/view/1299>, diakses tanggal 20 juni 2016).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. Penerbit Bandung Alfabeta.